

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. APEC

APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) suatu organisasi yang didirikan pada tahun 1989, beranggotakan 21 negara yang merupakan penyumbang sekitar 40,5% dari seluruh populasi di dunia, sekitar 54,2% dari GDP dunia dan sekitar 43.7% dari perdagangan dunia. (g-excess.com). Sebagai daerah dengan ekonomi yang paling dinamis di dunia, kawasan Asia-Pasifik semakin menjadi pusat gravitasi dalam perekonomian dunia (Weixing, 2009).

APEC didirikan pada mulanya untuk mendorong keterbukaan antar wilayah di kawasan asia-pasifik. Alasan utama pendirian APEC diantaranya:

- a) Adanya peningkatan jumlah pembentukan organisasi antar kawasan yang cenderung lebih mementingkan kesejahteraan anggota dan cenderung mendiskriminasikan non-anggota.
- b) Peningkatan perlindungan terhadap risiko perdagangan global yang cenderung memberikan peluang pembentukan organisasi antar kawasan.
- c) Ketergantungan ekonomi antar negara-negara asia-pasifik telah berkembang selama lebih dari dua puluh tahun melalui peningkatan

commit to user

arus perdagangan dan investasi yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan di kawasan tersebut. (Yoo dan Sung, 1994)

Tabel 2.1
Daftar Anggota APEC

No	Nama Anggota	Tahun Diterima	No	Nama Anggota	Tahun Diterima
1.	 Australia	1989	12.	 Thailand	1989
2.	 Brunei Darussalam	1989	13.	 Amerika Serikat	1989
3.	 Kanada	1989	14.	 Republik Cina	1991
4.	 Indonesia	1989	15.	 Hong Kong	1991
5.	 Jepang	1989	16.	 RRC	1991
6.	 Korea Selatan	1989	17.	 Meksiko	1993
7.	 Malaysia	1989	18.	 Papua New Guinea	1993
8.	 Selandia Baru	1989	19.	 Chili	1994
9.	 Filipina	1989	20.	 Peru	1998
10.	 Singapura	1989	21.	 Russia	1998
11.	 Vietnam	1998			

Meningkatnya ketergantungan ekonomi regional antar kawasan asia-pasifik menunjukkan kebutuhan adanya konsultasi yang efektif antar pengambil keputusan di setiap wilayah untuk meningkatkan dan memperkuat prospek sistem perdagangan multilateral; memberikan kesempatan untuk meningkatkan arus perdagangan; serta mengidentifikasi berbagai praktik kepentingan ekonomi bersama. (Lee, 1996).

Untuk itu, APEC berperan dalam membangun masyarakat di kawasan asia-pasifik, terlihat dalam pembangunan dari segi kapasitas kelembagaan, proses kepercayaan diri, serta keterbukaan organisasi regional. Dibuktikan dengan semua negara asia-pasifik memiliki kepentingan yang kuat dalam membangun rezim perdagangan multilateral melalui komitmen untuk perdagangan dan investasi yang bebas. APEC merupakan suatu organisasi yang beroperasi atas dasar komitmen sukarela dan tidak mengikat, keterbukaan komunikasi dan sikap saling menghormati pandangan antar setiap anggota. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik dengan cara mengurangi tarif dan hambatan perdagangan serta menciptakan ekonomi domestik yang efisien dan mampu meningkatkan ekspor. (Weixing, 2009)

Kunci utama untuk mencapai visi APEC tersebut adalah dengan keterbukaan dan kebebasan dalam membantu perdagangan dan investasi pertumbuhan ekonomi serta memberikan kesempatan yang lebih besar untuk perdagangan internasional, yang ditetapkan melalui prinsip umum *Osaka Action Agenda* yang berisi tentang:

- a) Kelengkapan, mencakup semua hambatan terhadap sistem perdagangan dan investasi.
- b) Konsistensi, langkah liberalisasi dan fasilitasi akan konsisten dengan ketentuan *World Trade Organization* (WTO).

- c) Komparatif, mewujudkan kesebandingan langkah liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi yang ditempuh anggota.
- d) Non-diskriminasi, hasil liberalisasi dan fasilitasi dinikmati oleh anggota maupun non anggota APEC.
- e) Transparansi, menjamin transparansi perundangan, peraturan dan prosedur administrasi di semua anggota APEC.
- f) *Standstill*, menahan diri untuk tidak menerapkan kebijakan yang menambah tingkat proteksi.
- g) Proses liberalisasi dan fasilitasi dimulai sesegera mungkin, berkesinambungan namun tetap memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan masing-masing anggota.
- h) Fleksibilitas, memungkinkan masing-masing anggota untuk mampu menghadapi isu yang muncul dari perbedaan tingkat pembangunan masing-masing anggota.
- a) Kerjasama ekonomi dan teknik yang mendukung liberalisasi dan fasilitasi. (Elek *et. al.*, 1999)

Manfaat kerjasama ekonomi asia-pasifik digunakan untuk pengembangan pada bidang yang meliputi: studi ekonomi; liberalisasi perdagangan; investasi, transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia; serta kerjasama sektoral, seperti di bidang pariwisata, energi, lingkungan dan pembangunan infrastruktur (Lee, 1996).

Pariwisata mampu meningkatkan sosial, budaya, ekonomi serta kesejahteraan anggota APEC dengan cara mengurangi hambatan usaha

pariwisata dengan pembentukan jaringan informasi pariwisata, peningkatan mobilitas wisata melalui sarana transportasi udara, serta permintaan barang dan jasa di daerah pariwisata tersebut (Taek *et. al.*, 2001). Untuk memenuhi permintaan barang di kawasan asia-pasifik pada tahun 1999 APEC mengeluarkan sebuah program yang dikenal dengan *Eight Options*² dimana salah satu pilihan mengacu pada angkutan udara (*air freight*), yaitu tentang tidak adanya pembatasan dalam jasa angkutan udara antar negara APEC (Grosso dan Shepherd 2009). *Association of Asia Pacific Airlines* (AAPA) pada tahun 2005 telah menangani sepuluh juta ton kargo pertahun sekitar sepertiga volume perdagangan kargo didunia (Senguttuvan, 2006). Negara APEC mendominasi volume lalu lintas perdagangan kargo didunia pada tahun 2005, dari sepuluh penerbangan di dunia tujuh penerbangan merupakan penerbangan milik anggota APEC yaitu Federal Express Corp, United Parcel Service, Korean Air, Singapore Airlines, Cathay Pasific, China Airlines, Eva Air dan Japan Airlines. (Grosso *et. al.*, 2009)

Terdapat hubungan langsung antara *air cargo*, perdagangan dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) karena *air cargo* memungkinkan perdagangan antar bangsa-bangsa yang terpaut jarak yang jauh serta mempercepat rantai pemasokan dengan cara yang handal, negara - negara

² merupakan identifikasi dari area kunci liberalisasi *aviation-market* yang terdiri dari kepemilikan dan control bisnis, tarif, penghapusan hambatan bisnis, *air freight*, perjanjian, hak istimewa, pengaturan kerjasama, serta akses pasar tujuannya untuk memastikan kesempatan yang adil dan perataan ekonomi bagi negara yang terlibat. (Grosso, 2008).

dengan kemampuan *air cargo* yang baik memiliki keunggulan kompetitif yang mampu meningkatkan PDB negara yang bersangkutan (Senguttuvan, 2006).

Pertumbuhan sektor penerbangan yang kuat di negara anggota APEC mungkin karena beberapa faktor seperti keanekaragaman tingkat pembangunan ekonomi negara anggota APEC, negara - negara yang sedang berkembang diperkirakan akan lebih cepat meningkatkan pertumbuhan lalu lintas udara serta jumlah populasi yang besar dan wilayah geografi yang terpisah jauh memungkinkan dipergunakannya sarana lalu lintas udara sebagai alat transportasi yang utama (Grosso, 2008).

2. *Agency Theory*

Di dalam sebuah perusahaan terdapat hubungan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (eksekutif perusahaan). *Agency theory* timbul ketika *principal* mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* berkaitan dengan menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan. Permasalahan yang menimbulkan *agency theory* menurut www.investopedia.com diantaranya:

- a. masalah yang muncul ketika keinginan atau tujuan dari *principal* dan *agent* berada dalam konflik dan *principal* tidak dapat memastikan apa yang benar-benar dilakukan oleh *agent*,

- b. masalah yang timbul ketika *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Karena toleransi risiko yang berbeda, *principal* dan *agent* mungkin masing-masing cenderung untuk mengambil tindakan yang berbeda.

Agency theory menjelaskan hubungan antara dua belah pihak (kreditur dan manajemen) yang memiliki tujuan yang tidak selaras, dimana tujuan dari teori ini adalah untuk menentukan kondisi dan kontrak yang optimal untuk dapat meminimalkan efek dari ketidaksesuaian tujuan kedua belah pihak tersebut. (Bhattacharjee, 2012).

Teori keagenan menggambarkan masalah insentif yang disebabkan oleh pemisahan kepemilikan dan kontrol, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan antara kontrak yang di buat oleh dua belah pihak dalam suatu perusahaan (Su *et. al.*, 2008; Clogan, 2001; Ahmed, 2009). Teori tersebut mengasumsikan bahwa pada dasarnya setiap orang tidak akan menyerah untuk mewujudkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan *principal* (Sadiq *et. al.*, 2010; Nicoleta *et. al.*, 2010).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, manajemen juga hanya peduli dengan arus kas perusahaan dalam jangka waktu pendek yang mampu menghasilkan tingkat pengembelian yang tinggi (Colgan, 2001). Ketika manajemen lebih memilih bertindak untuk mengejar kepentingan mereka sendiri dan cenderung merugikan para pemegang saham, maka muncullah *agency cost* (Ugurlu, 2001) dimana

commit to user

agency cost tersebut dapat dikurangi dengan adanya mekanisme *corporate governance* (Jensen dan Meckling, 1976; Colgan, 2001).

Dalam praktik pengungkapan sukarela, *agency theory* dapat terjadi ketika seharusnya manajer yang memiliki akses yang lebih baik ke dalam informasi perusahaan (peluang investasi dan kebijakan pembiayaan perusahaan) tidak mengungkapkan informasi secara kredibel dan handal karena kepentingan mereka sendiri yang mengakibatkan tingginya biaya modal yang dan rendahnya nilai investasi pemegang saham serta rendahnya nilai perusahaan. (Barako, 2007)

Singh (2003) menekankan teori keagenan terhadap *tradeoff* antara risiko dan insentif manajemen. Secara khusus, agen cenderung menghindari risiko, tugas tetap dan pengukuran kinerja sehingga setidaknya ada dua permasalahan penting yang timbul dari hubungan antara *principal* dan *agent*, yaitu berkaitan dengan ukuran kinerja atas pelaporan yang dihasilkan oleh *agent* yang telah melalui pemantauan pihak ketiga serta lingkup tugas seorang *agent*. Untuk menangani *moral hazard* tersebut perlu adanya agen pusat atau *owner-manager* yang mengkhususkan diri dalam pemantauan anggota tim karena pada gilirannya *owner-manager* juga ikut serta dalam mengakui keuntungan perusahaan walaupun dalam skala yang masih kecil.

Permasalahan klasik yang masih sering dihadapi di dalam suatu perusahaan publik adalah adanya asimetri informasi antara manajer dan investor luar yang menyebabkan peningkatan permintaan atas pelaporan

dan pengungkapan informasi keuangan perusahaan (Healy dan Palepu, 2001). Konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh investor adalah ketika investor hanya dapat mengandalkan laporan dari manajemen berkaitan dengan pendapatan perusahaan konsekuensi yang harus dihadapi adalah manipulasi informasi yang mungkin dilakukan oleh manajemen ketika kompensasi sebagai satu-satunya basis pengukuran kinerja manajemen, dimana kekuatan insentif tersebut mampu meningkatkan perilaku disfungsional oleh *agent*. Untuk mengurangi perilaku tersebut, investor mengandalkan pada sistem peraturan yang rumit dan pihak ketiga, seperti auditor dan dewan direksi, untuk memverifikasi laporan yang dikeluarkan oleh manajemen (Singh, 2003).

Menurut teori keagenan pengungkapan informasi berkenaan dengan risiko mampu mengurangi biaya monitoring. Pengungkapan risiko ini dibuat untuk meyakinkan investor bahwa pemegang saham dan manajer tidak menghindari kontrak utang sehingga dapat mengurangi kemungkinan risiko yang dirasakan oleh investor dan mengurangi konflik kepentingan (Hemrit dan Arab, 2011).

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai:

a. Biaya monitoring oleh *principal*

Merupakan biaya pemantauan (monitoring) berupa insentif manajemen untuk memastikan *agent* selalu bertindak untuk kepentingan *principal* sebagai akibat dari adanya pendelegasian sebagian wewenang dari *principal* kepada *agent*.

commit to user

b. Biaya pengamanan oleh *agent*

Merupakan sumber daya yang harus dikeluarkan oleh *agent* untuk memastikan bahwa *agent* tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan *principal*.

c. Kerugian residual pemilik

Merupakan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh *principal* akibat adanya perbedaan keputusan yang diambil antara *agent* dan *principal*.

3. Pengungkapan

Setiap entitas usaha harus menyampaikan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan sejenis lainnya oleh investor potensial, kreditur ataupun pengguna lainnya. Sesuai dengan *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 1* penyajian laporan keuangan perusahaan adalah agar suatu usaha dapat dibandingkan baik antar periode maupun dengan entitas lain, selain itu laporan keuangan merupakan sarana manajemen untuk menunjukkan pertanggungjawabannya atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Melalui *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 60* dijelaskan ketentuan atas pengungkapan instrumen keuangan bagi suatu entitas kedalam dua kategori diantaranya:

commit to user

- a. Entitas harus mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Selain itu, entitas juga disyaratkan untuk mengungkapkan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan.
- b. Entitas harus mengungkapkan informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul di dalam suatu entitas agar pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan suatu entitas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010).

Untuk perusahaan publik, pemerintah melalui Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-134/BL/1996 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menegaskan bahwa entitas harus menyampaikan laporan tahunan yang paling tidak memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* yang telah dan akan dilaksanakan oleh entitas mengenai penjelasan tentang risiko-risiko yang dihadapi entitas serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. (www.bapepam.go.id)

Tujuan dari *disclosure* adalah agar para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang terbaik dengan informasi yang penting dan relevan sehingga manfaat yang dicapai lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Untuk itu, *disclosure* harus memiliki tiga konsep :

commit to user

- a. Memadai (*adequate*); batas minimal *disclosure* harus dipebahi agar ikhtisar-ikhstiar keuangan menjadi tidak menyesatkan.
- b. Layak (*fair*); memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memerlukan informasi dari laporan keuangan.
- c. Penuh (*full*); menyajikan semua informasi yang relevan (Tuanakotta, 1986).

Perkembangan ekonomi menyebabkan *mandatory disclosure* bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham tidak dapat memuaskan investor terhadap informasi yang dibutuhkan. Untuk itu, *voluntary disclosure* secara bertahap menjadi fokus baik di dalam maupun di luar negeri karena memberikan dampak positif terhadap komunikasi antara perusahaan dan pihak eksternal, dimana *voluntary disclosure* dapat mengungkapkan informasi lebih detail mampu mengurangi asimetri informasi, mampu memperdalam serta meningkatkan kelengkapan *mandatory disclosure* (Tian dan Chen, 2009).

4. *Business Risk*

a. *Risk*

Banyak definisi terkait dengan risiko. Pakar ekonomi, peneliti bahkan penilai (*appraisal*) memiliki pengertian masing-masing berkaitan dengan risiko. Secara tradisional, risiko diistilahkan sebagai sesuatu yang tidak pasti (Rejda, 2008). *Federal Aviation Administration* (2009) mendefinisikan risiko sebagai suatu bahaya
commit to user

yang memiliki dampak bagi masa depan yang tidak dikendalikan dan dapat dipandang sebagai ketidakpastian masa depan, dimana risiko tersebut dapat dipengaruhi oleh ada tidaknya keahlian yang digunakan. Situasi yang sama mungkin menghasilkan risiko yang berbeda jika suatu keahlian diterapkan pada situasi tersebut.

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu ketidakpastian yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan perusahaan yang terjadi akibat pengambilan keputusan transaksi dan konsekuensi pilihan atas investasi yang dapat mengurangi prediktabilitas hasil kinerja perusahaan (Miller, 1991; Demong dan Lu, 2012). Ketidakpastian tersebut terkait dengan adanya keuntungan maupun kerugian potensial serta adanya bahaya yang menyebabkan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan perusahaan (Fox dan Lupton, 1999; Solomon *et. al.*, 2000; ICAEW 2011). Menurut Clusif (2009) risiko ada karena entitas perusahaan memiliki aset dari alam yang menimbulkan konsekuensi adanya kerusakan bagi entitas yang bersangkutan. Sedangkan menurut (www.businessdictionary.com) risiko didefinisikan menjadi:

- 1) Sebuah kemungkinan atau ancaman kerusakan, cedera, kewajiban, kerugian, atau kejadian negatif lain yang disebabkan oleh kerentanan eksternal atau internal.

- 2) Dari segi keuangan, risiko merupakan kemungkinan bahwa pengembalian dari suatu investasi akan lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan.
- 3) Dari segi perdagangan efek risiko merupakan kemungkinan kerugian atau penurunan nilai. Risiko *trading* dibagi menjadi dua kategori umum: risiko sistemik yang mempengaruhi semua sekuritas di kelas yang sama dan terkait dengan sistem modal pasar secara keseluruhan dan karena itu tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi (risiko pasar) dan risiko non-sistematik yang tidak berhubungan dengan pasar.

b. *Business risk*

Business risk mengasumsikan bahwa perusahaan akan menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai tambah bagi pemegang saham. Risiko ini berkaitan dengan produk pasar, teknologi, desain dan penjualan di mana perusahaan beroperasi. *Business risk* secara simetris mampu menciptakan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan (Jorion, 2000) untuk itu diperlukan keunggulan kompetitif yang mampu diciptakan oleh perusahaan yang memberikan suatu keadaan yang unik bagi perusahaan sehingga akan mampu mempengaruhi harga sekuritas perusahaan tersebut (www.qfinance.com). *Business risk* adalah tentang kemungkinan yang dialami oleh perusahaan dimana pengungkapan *business risk*

commit to user

mampu mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan investor (ICAEW, 2011). Mitchell dan Jones (2007) mengategorikan *business risk* sebagai:

- 1) *Catastrophic failure*, merupakan risiko yang mampu mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan terhadap arus sumber daya potensial perusahaan. Seperti bencana alam, perang, terorisme, *fraud* atau komitmen internal yang mampu mempengaruhi integritas keuangan perusahaan.
- 2) *Strategic failure*, kegagalan strategis yang terjadi pada tingkat korporasi maupun tingkat bisnis yang disebabkan adanya kesalahan dalam memahami kompetensi perusahaan jika dibandingkan dengan para pesaing serta kegagalan dalam analisis risiko tingkat makro-lingkungan atau industri.
- 3) *Operational failure*, merupakan ketidakmampuan organisasi dalam mempertahankan kualitas atau volume sumber daya yang mengalir kembali ke dalam perusahaan sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan ekspektasi para pemegang kepentingan di perusahaan yang mungkin mampu menurunkan tingkat keterlibatan investor pada perusahaan untuk tahun yang akan datang.

Business risk digunakan untuk menentukan faktor yang dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas atau keberhasilan suatu perusahaan. Sebuah risiko bisnis bisa berasal dari faktor eksternal

ataupun faktor internal. Faktor eksternal dari *business risk* sering di luar kendali perusahaan seperti penurunan ekonomi, penurunan permintaan suatu produk atau jasa dan adanya perubahan peraturan yang mempengaruhi suatu industri. Sedangkan faktor internal dari *business risk* merupakan masalah yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan karena perusahaan dapat menggunakan strategi-strategi yang telah direncanakan untuk mengendalikan ketidakpastian usaha yang berasal dari dalam perusahaan tersebut (Farrelly, 2013).

Pada umumnya, *business risk risiko* tercermin pada variabilitas pendapatan bersih operasional bersih atau besar kecilnya variasi dari *net cash flow* serta dapat dievaluasi pada titik waktu didasarkan pada distribusi probabilitas *net cash flow* (Gabriel dan Baker, 1980). Semakin rendah *business risk* memungkinkan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dengan biaya yang lebih rendah sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien (Amit dan Wernerfelt, 1990). Hampir semua perusahaan memiliki risiko yang terkait dengan usaha mereka, tetapi dengan menentukan dan mengungkapkan jumlah *business risk* adalah merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi nilai sekuritas ataupun saham perusahaan, investor akan mempertimbangkan *business risk* yang pada sebuah perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi (Farrelly, 2013). Lebih lanjut diterangkan dalam penelitian yang

dilakukan oleh Miihkinen (2010) bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah memiliki *business risk* yang tinggi sehingga akan mengungkapkan informasi tentang risiko lebih lanjut.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian berkaitan dengan pengungkapan informasi tambahan di dalam laporan keuangan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Meek *et. al.*, ., (1995) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mampu memengaruhi pengungkapan sukarela berkaitan dengan informasi strategis, *financial* dan *non-financial* di dalam *annual report* perusahaan multinasional di negara U.S, U.K, dan daratan Eropa diketahui bahwa ukuran perusahaan, negara, dan *international listing status* merupakan tiga variabel penting dalam menjelaskan pengungkapan sukarela dalam sampel, Variabel jenis industri hanya berpengaruh dalam beberapa kasus sedangkan variabel *multinationality*, *profitability* dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan dalam menjelaskan pelaporan sukarela terhadap sampel yang digunakan.

Eng dan Mak (2003) membahas pengaruh struktur kepemilikan dan komposisi direktur independen terhadap *voluntary disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Singapura pada akhir 1995 dimana structure kepemilikan ditandai dengan *managerial ownership*, *blockholder ownership*, dan *government ownership*. *Voluntary disclosure* dinilai berdasarkan penggabungan inti dari informasi strategis, *financial* dan *non-commit to user*

financial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *blockholder ownership* tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*. *Managerial ownership* yang rendah dan *government ownership* yang tinggi signifikan terhadap peningkatan *voluntary disclosure* dimana perusahaan besar dengan utang cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak.

Penelitian berkaitan dengan pengungkapan risiko dilakukan oleh Cabedo dan Tirado (2004) tentang macam-macam risiko yang mampu mempengaruhi kegiatan usaha dengan mengklasifikasikan risiko tersebut ke dalam kelompok keuangan dan non-keuangan. Setiap risiko dikuantifikasikan kedalam nilai risiko (VaR), VaR dapat digunakan untuk mengukur risiko bisnis, kredit dan pasar. Ukuran risiko yang diungkapkan di dalam laporan keuangan akan mampu meningkatkan manfaat informasi akuntansi bagi pihak eksternal dalam proses mengambil keputusan yaitu sebagai dasar yang objektif untuk menafsirkan risiko perusahaan, sebagai alat estimasi risiko serta sebagai dasar estimasi *expected return* dalam keputusan investasi.

Abraham dan Cox (2007) mengungkapkan kepemilikan perusahaan oleh *long-term institutions* berpengaruh negative terhadap jumlah risiko yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan di U.K, sedangkan jumlah direktur independen berhubungan positif. Terlepas dari bisnis, keuangan dan aspek pengendalian internal, pelaporan risiko di U.K juga masih dipengaruhi oleh bentuk peraturan atas pelaporan yang dibutuhkan masing-masing perusahaan.

Amran, *et. al.*, ., (2009) meneliti pengungkapan risiko management dalam laporan keuangan perusahaan di Malaysia mengemukakan bahwa diversifikasi (baik produk maupun geografis) dan tingkat leverage tidak berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko sedangkan ukuran perusahaan dengan jenis industri (khususnya infrastruktur dan teknologi) memiliki hubungan signifikan dengan luas pengungkapan risiko.

Hassan (2009) meneliti tingkat pengungkapan risiko pada perusahaan di *United Arab Emirates* mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dan adanya perusahaan cadangan tidak berhubungan secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan sedangkan tingkat risiko perusahaan dan jenis industry berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko.

Shammari dan Sultan (2010) mengkaji hubungan antara karakteristik *corporate governance* dan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan 170 perusahaan di Kuwait yang terdaftar Bursa saham di tahun 2007 menunjukkan hasil rerata tingkat pengungkapan sukarela oleh sampel perusahaan adalah 19 persen. Dari hasil tersebut diketahui bahwa komite audit signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Variabel kontrol (ukuran perusahaan, *leverage*, jenis auditor dan keanggotaan industri) menunjukan hasil yang kuat dalam pengungkapan sukarela. Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi pasar Kuwait melalui kendala tambahan pada

karakteristik *corporate governance* karena dari empat kriteria hanya satu yang menunjukkan hasil yang signifikan.

Comier *et. al.*, (2010) menyelidiki dampak *corporate governance* di negara Kanada atas asimetri informasi antara manajer dan investor dengan memperluas pengungkapan sukarela terlebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa atribut pemantauan formal seperti ukuran dewan dan komite audit serta luasnya pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap *corporate governance* di negara Kanada. Dimana perusahaan terlebih dahulu memperhitungkan biaya dan manfaat yang akan terjadi ketika menentukan pengungkapan *corporate governance* tersebut.

Dobler *et. al.*, (2011) meneliti kaitan antara analisis atribut, jumlah pengungkapan risiko dengan tingkat risiko perusahaan *manufacture* di negara U.S, Canada, U.K dan Jerman diketahui bahwa secara kuantitatif, U.S mendominasi adanya pengungkapan risiko dalam *annual report* diikuti oleh negara Jerman. Adanya perbedaan dalam atribut pengungkapan risiko antar negara tersebut disebabkan oleh perbedaan peraturan tentang pengungkapan domestik dimana insentif pengungkapan memiliki peranan yang penting.

Vu *et. al.*, (2011) melakukan penelitian tentang dampak direktur independen dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan di Vietnam yang terdaftar di bursa saham. Dari 45 perusahaan di Vietnam tersebut, diketahui bahwa tingkat *voluntary disclosure* masih relative rendah yaitu sebesar 24,23 persen. Terdapat pengungkapan yang

cukup terkait direktur dan manajemen senior tetapi pengungkapan tentang isu sosial masih sangat rendah. *Managerial ownership* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure* sedangkan *government ownership* berpengaruh secara negatif terhadap *voluntary disclosure* di negara Vietnam.

Olivera *et. al.*, (2011) mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela terkait dengan risiko di dalam *annual report* dari 111 bank yang berada di Portugis untuk tahun 2006. Kecukupan pengungkapan dinilai dengan menggunakan daftar kategori pengungkapan yang dikembangkan oleh Basel II³. Ditemukan bahwa pemantauan *stakeholder* dan reputasi perusahaan merupakan faktor penting dalam menjelaskan praktik pengungkapan risiko yang diamati. Stake holder pemantauan dan reputasi perusahaan adalah faktor penting yang menjelaskan praktek pelaporan risiko yang diamati. Pelaporan sukarela terkait dengan risiko dilakukan untuk memenuhi tekanan kelembagaan dalam menjamin efektivitas pasar serta untuk mengelola reputasi *stakeholder*.

Suhardjanto *et. al.*, (2012) melakukan penelitian untuk menguji peran *corporate governance* dalam praktik *risk disclosure*

³ diterbitkan pada bulan Juni 2004, dimaksudkan untuk menciptakan sebuah standar internasional tentang peraturan bagi perbankan dalam mengontrol berapa banyak modal bank yang harus disisihkan untuk menjaga terhadap jenis risiko keuangan dan operasional bank. (en.wikipedia.org)

pada perbankan di Indonesia mengemukakan bahwa *corporate governance* mempengaruhi tingkat *risk disclosure*. Variabel ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan leverage berpengaruh terhadap *risk disclosure* sedangkan variabel proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, latar belakang etnis komisaris independen, jumlah rapat komite audit dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*.

Ismail dan Shaib (2012) melakukan penelitian terkait *voluntary disclosure* pada perusahaan di Mesir dengan menambahkan kategori informasi prospek masa depan, mengemukakan bahwa tingkat pengungkapan sukarela di pasar Mesir berada pada tingkat rendah ke sedang. Informasi asimetri dan struktur kepemilikan berpengaruh signifikan dalam pengungkapan sukarela sedangkan laba dan tingkat persaingan tidak berpengaruh dalam pengungkapan sukarela.

Zadeh dan Eskandari (2012) melakukan penelitian literatur tentang hubungan karakteristik spesifik perusahaan khususnya terkait dengan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan risiko, dikemukakan bahwa terdapat perbedaan kualitas dan kuantitas terkait ukuran perusahaan antar negara, tetapi terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan risiko.

Elzahr dan Hussainey (2012) melakukan penelitian terhadap faktor yang menentukan pengungkapan risiko dalam laporan interm perusahaan di UK. Dari 72 perusahaan yang berbeda di UK tersebut analisis empiris

menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih banyak mengungkapkan risiko. *Corporate governance* serta *karakteristik* perusahaan seperti likuiditas, profitabilitas, *gearing*, dan *cross listing* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko dalam laporan interm perusahaan.

Ismail *et. al.*, (2012) meneliti hubungan antara kuantitas dan kualitas *voluntary risk disclosure* terhadap nilai pasar perusahaan dimana efek nilai pasar perusahaan tersebut diperiksa untuk memberikan dukungan bahwa pengungkapan sukarela mengenai informasi risiko perusahaan dapat meningkatkan keyakinan investor terhadap konsistensi peningkatan nilai perusahaan, ditemukan bahwa kuantitas *voluntary risk disclosure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Probohudono *et. al.*, (2013a) berkaitan dengan analisis terhadap lima kategori risiko (*business risk, credit risk, operating risk, market risk* dan *strategy risk*) di negara Australia, Indonesia, Malaysia dan Singapura diketahui bahwa pengungkapan *business risk* merupakan risiko yang paling tinggi tingkat pengungkapannya selama periode penelitian sedangkan *strategy risk* merupakan risiko yang rendah tingkat pengungkapannya. Untuk analisis regresi menampilkan variabel negara, ukuran perusahaan dan board independen yang secara statistik mampu menjelaskan luas dari pengungkapan resiko sedangkan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi tingkatan pengungkapan risiko.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Probohudono *et. al.*, (2013b) melakukan penelitian terhadap pengungkapan risiko selama krisis global di

negara Australia, Indonesia, Malaysia dan Singapura, mengemukakan bahwa variabel negara, ukuran perusahaan dan board independen secara statistik mampu menjelaskan luas dari pengungkapan risiko sedangkan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi tingkatan pengungkapan risiko, Perbedaan level pengungkapan risiko di berbagai negara dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan ekonomi pengeraknya.

Elshandidy *et. al.*, (2013) meneliti dampak gabungan tingkat *voluntary disclosure* maupun *mandatory disclosure* pada *annual report* perusahaan UK yang terdaftar di bursa saham. Ditemukan bahwa perusahaan yang memiliki risiko usaha yang tinggi cenderung lebih sensitif terhadap tingkat risiko yang mendasari sehingga akan mengungkapkan informasi risiko baik *voluntary* maupun *mandatory* lebih baik dari perusahaan yang memiliki risiko udaha lebih rendah. *Mandatory disclosure* dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan, pendapatan dividen, *board independen* dan secara negatif oleh *leverage* yang tinggi.

Barros *et. al.*, (2013) meneliti tentang efek *corporate governance* terhadap *voluntary disclosure* di negara Perancis dengan menggunakan laporan tahunan periode 2006 hingga 2009 perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek. Ditemukan bukti bahwa *voluntary disclosure* di dalam *annual report* meningkat dengan adanya *managerial ownership*, *board independen* dan komite audit independen, frekuensi rapat dewan direksi dan kualitas audit eksternal dan lebih meningkat lagi dengan ukuran perusahaan, peningkatan keuntungan dan penurunan utang perusahaan.

Telah cukup banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan *voluntary disclosure* di berbagai negara dengan menggunakan berbagai macam variabel. Dari penelitian-penelitian tersebut diperoleh hasil yang berbeda-beda terkait *voluntary disclosure*. Untuk itu, penelitian ini menggunakan variabel yang telah ada sebelumnya untuk diteliti kembali agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap *voluntary business risk* pada perusahaan penerbangan di negara anggota APEC.

C. Pengembangan Hipotesis

a. Country

Setiap negara memiliki pandangan yang berbeda berkaitan dengan kebijakan pengungkapan yang dilakukan. Probohudono *et. al.*, (2013b) mengungkapkan bahwa negara merupakan prediktor dalam luas pengungkapan suatu perusahaan. Pengelompokan negara juga berguna untuk menunjukkan strategi penelitian lintas negara sehingga mampu meyakinkan dan mempermudah peneliti dalam mengelompokkan sampel secara memadai (Gupta *et. al.*, 2002). Sejalan dengan penelitian Faisal *et. al.*, (2011) yang mengungkapkan adanya hubungan sistem bisnis (pengelompokan negara menjadi tiga bagian: *emerging market*, *commutarian*, dan *anglo saxon*) dengan pelaporan sukarela berkenaan dengan keberlanjutan usaha dimana negara-negara *emerging market* mengkomunikasikan informasi keberlanjutan lebih besar dibanding

negara-negara yang lain. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₁ : *Country cluster* berpengaruh positif terhadap *voluntary business risk disclosure*

b. Ukuran Perusahaan

Perusahaan besar lebih menginginkan untuk tingkat pengungkapan yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil (Meek *et. al.*, ., 1995; Lopes dan Rodrigues., 2007; Kolsi., 2012). Karena perusahaan besar memiliki *stockholder* yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Dengan demikian beban pengungkapan menjadi lebih berat untuk perusahaan karena harus memenuhi kebutuhan kelompok yang lebih besar pula (Hassan *et. al.*, ., 2009). Ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko secara positif (Zadeh dan Eskandari, 2012).

Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah :

H₂ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *voluntary business risk disclosure*

c. Proporsi *Board Independent*

Proporsi *Board independent* yang tinggi mampu untuk mengurangi *agency cost* karena keberadaan *board independent* merupakan suatu cara bagi shareholder dalam memonitor manajemen. *Board independent* berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan pengungkapan risiko

oleh perusahaan (Probohudono *et. al.*, , 2013a)._Direktur independen diinginkan karena luasnya pengetahuan, pengalaman dan sifat independensi yang dimiliki. Direktur independen memiliki reputasi yang baik sebagai professional yang tidak berada dibawah kepentingan pihak internal (Bathala dan Rao, 1995). Penelitian,yang dilakukan oleh Cormier *et. al.*, (2009) menunjukkan bahwa ukuran *board independent* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*, dimana pengungkapan *corporate governance* tersebut mampu mengurangi adanya asimetri informasi antara investor dan manajemen (Cormier *et. al.*, ,2009). Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₃ : Proporsi *board independent* berpengaruh positif terhadap *voluntary business risk disclosure*.

d. Proporsi *Government Ownership*

Airline-aviation companies di negara berkembang masih sangat terpengaruh oleh campur tangan pemerintah khususnya dalam hal liberalisasi yang berpengaruh terhadap kepemilikan suatu *airlines-aviation companies* (Chang *et. al.*, 2004). Dimana kepemilikan pemerintah, mampu meningkatkan moral hazard dan *agency problem* dan untuk mengurangi masalah tersebut diperlukan pengungkapan informasi secara sukarela (Eng dan Mak, 2003). Bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya, Penelitian Abraham dan Cox (2007);
commit to user

Janadi (2010); Vu *et. al.*, ,(2011) menemukan hubungan negatif antara kepemilikan pemerintah dan tingkat pengungkapan, penelitian tersebut menunjukkan bahwa investor pemerintah bereaksi negatif terhadap pengungkapan risiko. Vu, *et. al.*, , (2011) juga menyatakan dalam perekonomian terpusat, laporan akuntansi lebih digunakan untuk perencanaan bagi pemerintah dibandingkan untuk memperoleh modal dari pihak luar sehingga manajemen kurang berpengalaman dalam mengarahkan perusahaan dalam lingkungan pasar serta kemudahan bagi pemerintah untuk mengakses laporan keuangan menyebabkan manajemen tidak memiliki motivasi untuk mengungkapkan informasi tambahan kepada pihak luar yang diimbangi dengan rendahnya permintaan pasar sejalan dengan tingginya kepemilikan pemerintah. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₄ : Proporsi *government ownership* berpengaruh negatif terhadap *voluntary business risk disclosure*

e. Proporsi *Managerial Ownership*

Menurut Jensen dan Meckling (1976) prinsip *agency theory* mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial mampu meredakan *agency cost* karena manajer yang memiliki sebagian kecil saham dari suatu perusahaan memiliki insentif untuk menanggung konsekuensi dan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, tingkat kepemilikan manajerial yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan untuk *commit to user*

menyelaraskan insentif manajer dengan pemegang saham sehingga mampu memotivasi manajer untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela. Kepemilikan managerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela dimana kepemilikan managerial yang lebih tinggi mendorong perusahaan untuk memberikan informasi lebih besar (Vu *et. al.*, ., 2011). Peningkatan kepemilikan managerial mampu meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela (chakroun, dan matoussi., 2012; Barros, *et. al.*, , 2013). Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₅ : Proporsi *managerial ownership* berpengaruh positif terhadap *business risk disclosure*.

f. Auditor

Kualitas audit memainkan peran sentral dalam proses akuntansi secara umum dan dalam pengungkapan kebijakan pada khususnya. Auditor mampu menyediakan kepastian independen berkenaan dengan kesesuaian antara laporan keuangan perusahaan dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. (Healy dan Palepu, 2001). Pemilihan menggunakan auditor *Big Four* oleh perusahaan dianggap sebagai sinyal positif oleh pasar modal, karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut selalu tinggi dimana perusahaan yang memiliki biaya *agency cost* yang tinggi cenderung memilih auditor yang berkualitas tinggi untuk mengurangi *agency cost* tersebut (Lopes dan *commit to user*

Rodrigues, 2007). Perusahaan yang melibatkan auditor *Big Four* dianggap memiliki perspektif masa depan yang lebih baik dengan adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan auditor *Big Four* dengan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan (Lopes dan Rodrigues., 2007; Kolsi., 2012). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dikembangkan adalah:

H₆ : Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap *business risk disclosure*.

Gambar berikut menyajikan kerangka penelitian yang menunjukkan pengaruh: negara, ukuran perusahaan, proporsi *board independent*, proporsi kepemilikan usaha, dan auditor terhadap *business risk disclosure* dengan profitabilitas, *leverage* dan proporsi *load factor* sebagai variabel kontrol.

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

